

DAFTAR BACAAN

Buku :

Abdul Rahman, 1995, *Ilmu Hukum Tata Negara, Teori Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan*, Citara Aditya Bakti, Bandung

Abdul Rasyid, 2011, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam system Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya, Jakarta,

A.Hamid.S Attamimi, 1990, “*Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara – Suatu studi analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu Pelita I – Pelita IV (Disertasi Dokter UI Jakarta,*

Amiroeddin Syarif, *Perundang-Undangan, Dasar, Jenis Dan Teknik Pembuatannya*, PT. Bina Aksara, Jakarta.

Bagir Manan, 1992, *Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta Indonesia Hill Co,

Brata Kusuma & Solihin, 2002, *Otonomi Daerah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gramedia utama, Jakarta,

Brian Thompson, 1993, *Textbook on Constitutional & Administrative Law, 3rd Edition*, London: Blackstone Press Limited,

Bisariyadi, Anna Triningsih, Meyrinda Rahmawaty H dan Alia Harumdani W., 2012, *Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta,.

Basic Law for the Federal of the Republic of German,

Dahlan Thaib, 1993, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Yogyakarta, Liberty,

Gabriel A. Almond et.al., 2009, *Comparative Politics Today, A World View, Eight Edition* Dorling Kinderley: New Delhi,

George W. Grayson, 1990, *The Electoral Disputes Tribunal* (Transaction Publisher: New Jersey,)

Henry W. Ehrman (edt), 1964, *Democracy in Changing Society*, (USA: Frederick A Preager Publisher,).

Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, New York: Russell and Russell,.

IFES, *Pedoman untuk Memahami, Menangani, dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu*, editor Chad Vickery, diterjemahkan oleh Ay San Harjono, (Washington,DC: IFES, 2011),

Iwan Satriawan, Helmi Kasim, Siswantana Putri Rachmatika, Alia Harumdani Widjaja, 2012, *Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta,

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Kosntitusi Press, Jakarta,.

-----, 2004, *Format kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII PRESS, Yogyakarta.

-----, 2009, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,.

-----, 2010, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2006, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Konstitusi Press, Jakarta.

-----, 2009, *the Constitutional Law of Indonesia*, (Kuala Lumpur: Sweet and Maxwell.

Joko Riskiyono, 2015, *Hak Publik Berpartisipasi Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu Demokrasi*, *Jurnal Pemilu dan Demokrasi Memotret Penegakan Hukum Pemilu 2014 No. 6 Tahun 2013, Perludem*

JPPR dan IEFS, 2015, *Potret Pemilu Akses dalam Pemilu Presiden 2014 di Indonesia: Hasil Pemantauan di Aceh, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan and Sulawesi selatan*, Jakarta: Agenda.

Jum Anggriani, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Maria Farida Indrati.S, 1998, *Ilmu perundang-undangan, Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.

Maria Farida Indrati Soeprapto, 2010 *Ilmu Perundangundangan:Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.

Organisation for Economic and Development, 2008, *Brazil: Strenghtening Governance forGrowth* (OECD: Paris,),

Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.

Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, dan Topo Santoso, 2011, *Penanganan Sengketa Pemilu*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan,

Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.

Samuel Huntington, 1991, *The Third Wave: Democratization In The Late Twentieth Century*, Oklahoma: University of Oklahoma Press.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010 *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Soimin Mashuriyanto, 2013, *Mahkamah Konstitusi dalam system ketatanegaraan Indonesia*, UII Pers, Jakarta,

Slamet Suhartono, 2015, *jurnal Konstitusionalitas Badan Peradilan Khusus dan MK dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung*,

Teguh Prasetyo dan Arief Purnomosidi, 2014, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusa Media, Bandung,

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, Yogyakarta,

The Constitution of Austria

Topo Santoso, dkk, 2006, *Penegakan Hukum Pemilu: Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009 – 2014*, Jakarta: Perludem,

Peraturan perundang-undangan :

Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

Yurisprudensi :

Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor 072/PUU-II/2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor 073/PUU-II/2004.

Wapsite

http://m.beritajatim.com/politik_pemerintahan/236686/pengadilan_pemilu_indonesia_belajar_ke_amerika_latin.html#.VVhb5vAYPuw, diakses pad 17 Mei 2017

<http://english.tse.jus.br/the-electoral-justice/the-electoral-justice-1/the-electoral-justice>, diakses pada 17 Mei 2017.

http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Internacional_English/#2) diakses pada 28 Mei 2017

<http://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/11-artikelkompas/499-sewindu-mahkamah-konstitusi.html>, diakses pada 17 Mei 2017

www.icl.journal.com, diakses 29 November 2016.

<http://www.iuscomp.org/gla/literature/Inbverfg.htm>, diakses 24 November 2011.